



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sumedang Nomor B/6596/100.3.1.2/VIII/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 Perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2025 dan Propemperda Tahun 2026;

2. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor B/906/000.3.2/VIII/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 27 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,



ATANG SETIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 10 TAHUN 2025

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2025

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	Peraturan Daerah	Bangunan Gedung	a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung b. Standar Teknis (mulai dari perencanaan hingga pembongkaran serta pengaturan khusus seperti bangunan hijau, cagar budaya, dan fungsi khusus) c. Proses penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk izin dan prosedur administratif d. Sanksi administratif e. Peran Masyarakat f. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah	✓		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	✓		- DPUTR - DPMPTSP - DLHK - Dishub - Satpol PP - Dinas Damkar dan Penyelamatan - DPKPP	Triwulan III	Mencabut Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung
2	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah	Perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, dan Kelembagaan Kepariwisataan	✓		Untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan	✓		- Disparbudpora - Perangkat daerah terkait - Lembaga pendidikan	Triwulan I	

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
3	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medial Kabupaten Sumedang	a. Tugas dan wewenang dan penghasilan Dewan Pegawas b. Organ Pendukung Dewan pengawas c. Jumlah Direksi berdasarkan kategori BUMD dan Rasio Biaya Operasi d. Penghasilan Direksi e. Kepegawaian Perumda Air Minum		✓	Penyesuaian terhadap Permendagri 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum		✓	- Setda - BKAD - Bapperida - Bapenda - Inspektorat Daerah - Perumda Air Minum - Tirta Medial	Triwulan I	-
4	Peraturan Daerah	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHETD II)		✓	Untuk mengakomodasi rencana penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHETD II)	✓		- Setda - BKAD - Bapperida - Bapenda - Inspektorat Daerah - PT. Bank BJB	Triwulan II	-
5	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Kewenangan dan tanggung jawab Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD b. Pemanfaatan BMD c. Penilaian BMD d. Tukar menukar BMD e. Penghapusan BMD		✓	Penyesuaian terhadap PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah		✓	BKAD	Triwulan I	
6	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari, dan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatnunggal	a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan Pengawasan	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	✓		- DPMD - Setda - Bapperida - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Triwulan IV	

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
7	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.	✓		Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
8	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah c. Pembiayaan Daerah	✓		Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
9	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	✓		Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
10	Peraturan Daerah	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan		✓					Inisiatif DPRD	Triwulan II	
11	Peraturan Daerah	Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro		✓					Inisiatif DPRD	Triwulan II	
12	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Rumah Susun		✓					Inisiatif DPRD	Triwulan IV	

13	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		✓						Insiatif DPRD	Trwulan IV	
----	------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	---------------	------------	--

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 27 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

